



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 609 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagai pedoman dalam implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2020-2025;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.

KESATU : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Bantul baik general maupun tematik.
- KETIGA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai ruang lingkup:
1. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General; dan
  2. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik.
- KEEMPAT : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.
- KELIMA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan karena:
- a. terjadi perubahan *roadmap* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul;
  - b. adanya perubahan tema atau fokus pelaksanaan Reformasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ataupun Pemerintah Kabupaten Bantul; dan/atau
  - c. hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi *roadmap* Reformasi Birokrasi.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 September 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul; dan
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 609 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA AKSI REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL

**I. Reformasi Birokrasi General**

Reformasi Birokrasi (RB) General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan RB General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis RB dapat tercapai secara keseluruhan. RB General berfokus pada pelaksanaan kegiatan utama yang menjadi *mandatory*, kegiatan utama tersebut antara lain:

**Tabel 1. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General**

No	Kegiatan Utama	Indikator	Tahun Target 2025	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
					Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
1	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	5	Menyusun Standardisasi Tim Kerja	Dokumen	Jumlah dokumen Standardisasi Tim Kerja		1	1		2	5.000.000	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
				Melaksanakan Evaluasi Efektifitas Sistem Kerja	Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan efektifitas Sistem Kerja				1	1	2.000.000	Bagian Organisasi, BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
2	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	4,18	Melaksanakan Reviu Kebijakan SPBE	Dokumen	Jumlah dokumen kebijakan SPBE yang telah direviu				1	1	10.750.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah
				Melaksanakan Audit Aplikasi, Infrastruktur dan Keamanan SPBE	Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan Audit Aplikasi, Infrastruktur dan Keamanan SPBE			2	1	3	3.400.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah
				Meningkatkan Layanan Pusat Pemulihan Bencana/DRC	Kegiatan	Terpenuhinya kegiatan pelayanan pusat pemulihan bencana/DRC				1	1	162.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Menyusun Laporan Pelaksanaan SPBE	Dokumen	Jumlah laporan pelaksanaan SPBE tahun 2025				1	1	24.300.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah
				Pemenuhan Kelaikan Keamanan Pusat Data dari Lembaga Tersertifikasi	Kegiatan	Surveillance ISO 27001 untuk pusat data				1	1	75.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	3	Melaksanakan Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	Dokumen	Jumlah dokumen hasil reviu arsitektur dan peta rencana SPBE				1	1	80.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator	Tahun Target 2025	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
					Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
				Melaksanakan <i>Entry</i> Arsitektur dan Peta Rencana SPBE pada SIA SPBE	Kegiatan	Jumlah kegiatan <i>entry</i> arsitektur dan peta rencana SPBE				3	3	10.125.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah
				Melaksanakan <i>Clearance</i> Belanja SPBE	Dokumen	Jumlah berita acara rekomendasi rencana dan anggaran SPBE			25		25	12.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah
3	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Nilai SAKIP	83	Menyusun pohon kinerja sebagai dasar penjenjangan kinerja pada RPJMD tahun 2025-2029	Dokumen	Tersusunnya pohon kinerja level pemda	1	1	1		3	8.500.000	Bappeda	Seluruh Perangkat Daerah
				Melakukan pendampingan penyusunan pohon kinerja perangkat daerah	Dokumen	Tersusunnya pohon kinerja level Perangkat Daerah	1	1	1		3	8.500.000	Bappeda	Seluruh Perangkat Daerah
				Menjabarkan <i>crosscutting</i> berdasarkan pohon kinerja dalam aplikasi esakip ROPK	Menu	Tersedianya fitur <i>crosscutting</i> dalam aplikasi esakip			1	1	2	4.250.000	Bappeda	Seluruh Perangkat Daerah
				Melakukan pembahasan penjenjangan kinerja untuk menentukan indikator kinerja dengan kriteria SMART	Dokumen	Jumlah berita acara pembahasan penjenjangan kinerja			28		28	17.000.000	Bappeda	Seluruh Perangkat Daerah
				Penyusunan Perjanjian Kinerja dengan format baru dan diverifikasi oleh Bagian Organisasi, Bappeda, Inspektorat ,dan Setda secara terpadu menggunakan aplikasi Bantara	Dokumen	Dokumen PK 2025 yang terverifikasi dengan target yang meningkat	55			55	55	-	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator	Tahun Target 2025	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
					Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
				Pemilihan program kegiatan berdasarkan pada penjenjangkan kinerja dituangkan dalam berita acara verifikasi Renstra PD	Dokumen	Tersusunnya Renstra dan renja dengan berdasarkan cascading			28		28	17.000.000	Bappeda	Seluruh Perangkat Daerah
				Melaksanakan rakor pengendalian kinerja perangkat daerah setiap triwulan untuk melakukan evaluasi selama satu triwulan berdasarkan pengukuran kinerja yang dilaporkan dalam aplikasi esakip	Kegiatan	Jumlah pelaksanaan rakor pengendalian	1	1	1	1	4	-	Bappeda	Seluruh Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Renja dan RKPD mengakomodir tindaklanjut dari hasil evaluasi LKJIP yang tertuang dalam Bab II	Dokumen	Dokumen RKPD dan Renja/Perubahan			2		2	97.115.000	Bappeda	Seluruh Perangkat Daerah
				Mengirimkan dua orang personel evaluator untuk mengikuti Diklat Evaluasi SAKIP diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP pada tanggal 24-28 Februari 2025	Peserta	Jumlah peserta Diklat Evaluasi SAKIP di Bogor	2				2	16.560.000	Inspektorat	Inspektorat
				Bimbingan Teknis Persiapan Evaluasi AKIP pada tanggal 26 Februari 2025 dengan narasumber dari KemenpanRB	Kegiatan	Jumlah bimtek evaluasi SAKIP	1				1	3.500.000	Inspektorat	Inspektorat
				Pelaksanaan penilaian mandiri AKIP pada perangkat daerah	Laporan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan penilaian mandiri		45			45	1.500.000	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
				Melaksanakan evaluasi implementasi SAKIP pada perangkat daerah dan pemda	Laporan	Perangkat daerah yang dilakukan evaluasi SAKIP		45			45	1.500.000	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator	Tahun Target 2025	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
					Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
				Melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja berkala setiap triwulan dan menyampaikan rapot kinerja setiap PD	Laporan	Jumlah rapot kinerja Perangkat Daerah setiap triwulan	45	45	45	45	45	1.200.000	Inspektorat	Inspektorat dan seluruh perangkat daerah
4	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0,75	Pendampingan Implementasi Zona Integritas	Kegiatan	Koordinasi dan pendampingan	1	1			2	-	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
				Seleksi dan pengajuan evaluasi Zona Integritas ke TPN	OPD/Unit Kerja	Terpilihnya Perangkat daerah yang akan mengikuti evaluasi ZI		3			3	-	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
				Mencanangkan dan pembangunan Zona Integritas pada level sekolah (SMP)	Kegiatan	Sosialisasi dan internalisasi Pembangunan Zona Integritas		1			1	-	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
				Melaksanakan survei mandiri Persepsi Anti Karupsi dan survei Mandiri persepsi pelayanan publik pada responden pengguna layanan perangkat daerah	Laporan	Perangkat daerah yang dilakukan survei mandiri SPAK dan SPKP pada pengguna layanan ekternal		3			3	1.275.000	Inspektorat	Disnakertrans, Kap. Sewon dan Kap. Pundong
				Melaksanakan pendampingan penilaian Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada perangkat daerah	Laporan	Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan penilaian ZI menuju WBK/WBBM		3			3	2.125.000	Inspektorat	Disnakertrans, Kap. Sewon dan Kap. Pundong
				Melaksanakan monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang telah mendapatkan predikat WBK dan WBBM	Laporan	Perangkat daerah yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM	1				1	500.000	Inspektorat	Dispendukcapil, DPMPTSP dan Kapanewon Pundong

No	Kegiatan Utama	Indikator	Tahun Target 2025	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
					Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
5	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3.25	Melaksanakan penilaian mandiri SPIP pada perangkat daerah yang diajukan penilaian SPIP	Laporan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan penilaian mandiri SPIP			45		45	1.000.000	Inspektorat	Semua Perangkat Daerah
				Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPIP pada perangkat daerah yang diajukan penilaian SPIP	Laporan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan penjaminan kualitas SPIP			45		45	1.000.000	Inspektorat	Semua Perangkat Daerah
				Pendampingan Manajemen resiko tingkat perangkat daerah	Laporan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan manajemen resiko	45				45	1.000.000	Inspektorat	Semua Perangkat Daerah
				Pelaksanaan evaluasi manajemen resiko tingkat perangkat daerah	Laporan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi manajemen resiko		45			45	1.000.000	Inspektorat	Semua Perangkat Daerah
				Pendampingan penyusunan Unit Pengelola Resiko tingkat perangkat daerah	Dokumen	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dalam penyusunan UPR		45			45	1.000.000	Inspektorat	Semua Perangkat Daerah
				Pelaksanaan evaluasi penyusunan Unit Pengelola Resiko tingkat Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi dalam penyusunan UPR		45			45	1.000.000	Inspektorat	Semua Perangkat Daerah
				Pendampingan manajemen resiko Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Laporan	Laporan pendampingan manajemen resiko Pemda Bantul			1		1	500.000	Inspektorat	Semua Perangkat Daerah
				Pelaksanaan evaluasi manajemen resiko Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Laporan	Laporan evaluasi manajemen resiko Pemda Bantul			1		1	500.000	Inspektorat	Semua Perangkat Daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator	Tahun Target 2025	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
					Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
				Pendampingan penyusunan resiko <i>fraud</i> tingkat perangkat daerah	Laporan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan penyusunan resiko <i>fraud</i>			7		7	350.000	Inspektorat	7 perangkat daerah
				Pelaksanaan evaluasi resiko <i>fraud</i> tingkat perangkat daerah	Laporan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi penyusunan resiko <i>fraud</i>			7		7	350.000	Inspektorat	7 perangkat daerah
6	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	4	Melaksanakan forum admin lapor perangkat daerah	Laporan	Admin lapor perangkat daerah semakin baik dalam penanganan aduan		1	0		1	2.550.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Semua Perangkat Daerah
				Melakukan publikasi melalui media informasi (media sosial, baliho, videotron)	Laporan	Masyarakat mengetahui media lapor aduan SP4N-LAPOR			2	2	4	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Membuat Renaksi tahun 2025 - 2028	Dokumen	Tersedianya Renaksi tahun 2025-2028				1	1	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Melakukan koordinasi, disposisi aduan, serta tindak lanjut aduan	Laporan	Terjawab dan terselesaikannya aduan yang masuk dari masyarakat	13	13	13	13	52	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	78	Melaksanakan sosialisasi SPI pada perangkat daerah	Perangkat Daerah	Perangkat daerah yang terlibat dalam penilaian SPI KPK		51			51	9.675.000	Inspektorat	semua PD kecuali Inspektorat dan RSUD PS
				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPI pada perangkat daerah	Laporan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi				1	1	-	Inspektorat	semua PD kecuali Inspektorat dan RSUD PS

No	Kegiatan Utama	Indikator	Tahun Target 2025	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
					Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
		Monitoring Center of Prevention (MCP) KPK		Perumusan rencana tindak lanjut pencegahan korupsi	Laporan	Jumlah laporan rencana tindak lanjut pencegahan korupsi			7	7	7	2.500.000	Inspektorat	Semua perangkat daerah
			94	Melaksanakan upaya-upaya pencegahan korupsi melalui 8 area pencegahan	Persen	Dokumen bukti dukung 8 area pencegahan korupsi				8	8	23.750.000	Inspektorat	Semua Perangkat daerah
8	Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	75	Pendampingan perangkat daerah dalam pengisian IKK	Dokumen	Laporan sosialisasi dan pendampingan perangkat daerah			1		1	288.062.600	Bagian Hukum	Analis Kebijakan
				Menyusun analisa kebijakan pada tahap perencanaan	Dokumen	Dokumen analisa kebijakan			1		1	-	Bagian Hukum	Analis Kebijakan
				Melakukan monev kebijakan yang disusun	Laporan	Laporan hasil monev kebijakan			1		1	-	Bagian Hukum	Analis Kebijakan
				Melibatkan JF AK dalam menyusun rekomendasi kebijakan	Orang	Jumlah JF AK dalam menyusun rekomendasi kebijakan			4		4	-	Bagian Hukum	Analis Kebijakan
9	Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	97,54	Mengoptimalkan proses harmonisasi produk hukum dan menyusun analisis dan evaluasi Perda	Dokumen	Jumlah dokumen harmonisasi, analisa dan evaluasi	1	1	1	1	4	28.250.000	Bagian Hukum	Bagian Hukum
				Mengikuti diklat penyusun perancang	Orang	Jumlah orang yang mengikuti diklat perancang	1				1	-	Bagian Hukum	Bagian Hukum
				Mengajukan akun IRH ke Kementerian Hukum	Dokumen	Surat pengajuan akun ke Kementerian Hukum	1				1	-	Bagian Hukum	Bagian Hukum
10	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	94	Melakukan pendataan penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Laporan	Laporan hasil pendataan penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	1	1	1	1	4	4.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Semua perangkat daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator	Tahun Target 2025	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
					Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
				Melakukan pendampingan penerapan aplikasi umum Bidang Kearsipan (SRIKANDI)	Perangkat daerah	Jumlah OPD yang didampingi		54			54	5.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Semua perangkat daerah
				Melakukan pengelolaan arsip statis melalui aplikasi SIKN JIKN	Persen	Persentase digitalisasi arsip arsip statis	100	100	100	100	100	4.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
11	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	3,01	Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas validata pendukung pada setiap produsen data, antara lain Pelatihan Sedata Sebantul, Pelatihan Proses Bisnis Statistik, dan Pelatihan Survei Pemetaan Kalurahan	Kegiatan	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan	1	2			3	17.280.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD dan seluruh kalurahan
				Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Bulan	Frekuensi pemeriksaan data seluruh produsen data	3	3	3	3	12	19.200.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD kalurahan, BUMD/Otoritas/ Instansi vertikal
				Reviu dan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Unit	Jumlah produsen data yang dikoordinasi dalam pemeriksaan dan penyebarluasan data	157	157	157	157	157	8.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD kalurahan, BUMD/Otoritas/ Instansi vertikal
				Pengadaan alat ukur geodetik untuk pengambilan data geospasial yang lebih akurat	Unit	Jumlah alat ukur geodetik		1			1	50.400.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Koordinasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral				128	128	20.025.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Tahun Target 2025	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
					Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
				Reviu dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	Persentase metadata kegiatan statistik yang dilaporkan ke aplikasi INDAH			50	50	100	8.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD
				Penyusunan peraturan bupati tentang satu data, dan peraturan bupati tentang NSPK penyelenggaraan statistik sektorai	Dokumen	Jumlah rancangan peraturan bupati yang disusun	1			1	2	2.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD kalurahan, BUMD/Otoritas/ Instansi vertikal
12	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	81	Melakukan bimtek PBJ kepada OPD (Workshop PBJ, Pembinaan Advokasi, Identifikasi Pengadaan, Pengadaan secara Elektronik)	Dokumen	Laporan bimtek	1	1	1	1	4	51.700.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
				Melakukan pendampingan PBJ kepada OPD (SIRUP, Pengadaan Transaksional, Pencatatan Non Tender, e-Purchasing)	Dokumen	Laporan pendampingan pemanfaatan sistem pengadaan	1	1	0	1	3	19.405.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
				Melakukan penambahan personel pengelola PBJ	Orang	Jumlah SDM pengelola pengadaan yang bertambah		3			3	-	BKPSDM	BKPSDM
				Menambahkan indikator e-purchasing dalam penilaian kinerja perangkat daerah	Dokumen	Revisi perup evaluasi perangkat daerah				1	1	10.000.000	Bappeda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
13	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	3	Melakukan pendampingan dan Verifikasi RKA dan DPA SKPD melalui aplikasi SIPD RI	Dokumen	Dokumen RKA dan DPA yang terverifikasi dan handal	99	99	99	99	396	34.625.000	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Semua perangkat daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator	Tahun Target 2025	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
					Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
				Melakukan pengawasan dan monitoring pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4	4	4	4	16	84.600.000	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Semua perangkat daerah
				Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akurat, akuntabel dan tepat waktu	Laporan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun n-1		1			1	417.901.000	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Semua perangkat daerah
				penyusuanan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan akuntabel dan tepat waktu	Dokumen	Dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan			1	1	2	132.250.000	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Semua perangkat daerah
				Penyusunan APBD dan APBD Perubahan Akuntabel dan tepat waktu	Dokumen	Perda dan perbup APBD dan APBD Perubahan	1		0	1	2	412.612.000	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Semua perangkat daerah
				Pemeliharaan basis data PBB P2	Bidang	Penambahan dan pemutahiran data Bidang PBB		6.500	6.500		13.000	261.498.020	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Subyek Pajak Daerah
				Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Pajak Daerah	Laporan	Laporan atas sosialisasi dan publikasi tentang Pajak Daerah		1	2	1	4	1.353.853.300	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Subyek Pajak Daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator	Tahun Target 2025	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
					Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
				Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen penerimaan atas tagihan pajak daerah	50.275	200.150	197.300	49.370	497.095	1.051.504.414	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Subyek Pajak Daerah
13	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	94	Melakukan pemetaan dan inventarisasi data temuan/catatan dan rekomendasi BPK	persen	Persentase Catatan/Temuan				94	94	4.000.000	Inspektorat	Inspektorat
				Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK	Kali	Koordinasi tindaklanjut rekomendasi BPK			1	1	2	-	Inspektorat	Inspektorat
				Melakukan tindak lanjut rekomendasi BPK dan Monev	Dokumen	Data tindaklanjut rekomendasi BPK Hasil monitoring dan rencana tindak lanjut				1	1	-	Inspektorat	Inspektorat dan BPKPAD
14	Penguatan Sistem Merit (Integrasi Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Penguatan Manajemen Talenta ASN dan Penataan Jabatan Fungsional)	Indeks Sistem Merit	287,5	Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan ASN	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan				1	1	7.687.500	BKPSDM	BKPSDM, Bagian Organisasi
				Rekrutmen CASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;	Laporan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan seleksi CASN		1			1	752.236.000	BKPSDM	BKPSDM
				Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) secara terbuka dan kompetitif;	Laporan	Laporan Hasil Promosi dan Mutasi JPT dan Jabatan Administrasi		1	1		2	453.090.000	BKPSDM	BKPSDM

No	Kegiatan Utama	Indikator	Tahun Target 2025	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
					Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
				Penyusunan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290	15.072.500	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
				Pemetaan Potensi dan Kompetensi ASN	Dokumen	Jumlah ASN yang melaksana pemetaan potensi dan kompetensi	175	800	950	950	2.875	160.112.500	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
				Pemberian Penghargaan Pegawai berprestasi	ASN	Jumlah ASN berprestasi yang mendapatkan penghargaan				15	15	134.200.000	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
				Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi kepegawaian	Aplikasi	Jumlah aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan				1	1	50.000.000	BKPSDM	BKPSDM
15	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAkhlik	75	Berkoordinasi dengan Pemda DIY terkait harmonisasi Budaya Kerja dan BerAKHLAK	Kegiatan	Memeberikan masukan terkait reviu Peraturan Gubernur DIY nomor 19 tahun 2022 terkait budaya pemerintahan.		1		1	2	-	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
				Melakukan internalisasi BUDaya Kerja kesemua Perangkat daerah dan Unit kerja	Kegiatan	Internalisasi budaya kerja	1	1		1	3	7.000.000	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
				Penyusunan Rencana aksi Budaya kerja	Dokumen	Tersusunnya rencana aksi Budaya kerja di setiap PD	1				1	2.000.000	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
				Laporan monev pelaksanaan Budaya pemerintahan	Dokumen	Tersusunnya monev pelaksnaan Budaya kerja				1	1	3.000.000	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
				Pengadaan Banner Budaya Kerja sebagai media sosialisasi	Buah	Tersedianya Banner budaya kerja			40	0	40		Bagian Organisasi	Bagian Organisasi

No	Kegiatan Utama	Indikator	Tahun Target 2025	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
					Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
				Penyusunan Raperbub Kode Etik Kode Perilaku	Dokumen	Tersusunnya perbub Kode Etik dan Kode Perilaku				1	1	2.000.000	BKPSDM	BKPSDM, Bagor, Bagian Hukum Inspektorat
				Pelaksanaan Kejuaraan Pegawai Berprestasi Tahunan (Kartika Punggawa Projo Taman Sari)	Orang	Terpilihnya pegawai berprestasi				9	9	134.200.000	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
				Penilaian perilaku 360 berbasis core value berakhhlak	Laporan	Laporan hasil penilaihan 360 individu pada Perangkat Daerah				46	46	2.000.000	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
16	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat	92	Pendampingan pelaksanaan survei dan penyusunan laporan SKM	Laporan	Jumlah pendampingan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat				1		5.000.000	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
				Pengembangan aplikasi SKM	Aplikasi	Bertambahnya menu evaluasi dan sistem keamanan		1		1	1	-	Bagian Organisasi	Dinas Kominfo
				Penyusunan laporan Survei kepuasan masyarakat (SKM)	Dokumen	Laporan Survei kepuasan masyarakat (SKM) kabupaten Bantul				1	2	2.000.000	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
		Indeks Pelayanan publik	4,2	Pendampingan penyusunan pemenuhan bukti dukung PEKPPP dan Evaluasi PEKPPP Mandiri	Kegiatan	Jumlah sosialisasi pendampingan		1	1		2	2.000.000	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
				Penilaian mandiri	Dokumen	Laporan evaluasi PEKPP Mandiri PD				1	1	1.000.000	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
		Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik	97,23	Pendampingan penyusunan bukti dukung evaluasi Kepatuhan standar pelayanan	Dokumen	Dokumen Kepatuhan standar pelayanan				1	1	2.000.000	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah



## **II. Reformasi Birokrasi Tematik**

Reformasi Birokrasi Tematik diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan tata kelola di sektor-sektor prioritas sehingga berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Tema Reformasi Birokrasi tematik meliputi:

1. Pengentasan Kemiskinan;
2. Realisasi Investasi;
3. Mendorong Hilirisasi;
4. Mendukung Ketahanan Pangan;
5. Mendorong Peningkatan Mutu dan Akses Layanan Kesehatan; dan
6. Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan.



**Tabel 2. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan**

**Sasaran tema : Menurunnya Angka Kemiskinan**

**Indikator : Prosentase Penduduk Miskin**

**Target : 10,75 - 11,02 %**

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinat-	Pelak-sana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Kualitas dan keterpaduan database Penanggulangan Kemiskinan belum Optimal	Tersedianya database pengentasan kemiskinan yang lengkap, terpadu dan terupdate	Cakupan Basis Data Terpadu	70 %	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	dokumen	-	1	-	1	2	124.683.616	Lain-lain	Disdukcapil	Disdukca-pil
Kualitas dan keterpaduan database Penanggulangan Kemiskinan belum Optimal	Tersedianya database pengentasan kemiskinan yang lengkap, terpadu dan terupdate	Cakupan Basis Data Terpadu	70 %	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	orang	10.000	100.000	10.000	20.000	50.000	584.910.416	Proses Bisnis dan SOP	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Kualitas dan keterpaduan database Penanggulangan Kemiskinan belum Optimal	Tersedianya database pengentasan kemiskinan yang lengkap, terpadu dan terupdate	Cakupan Basis Data Terpadu	70 %	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	keluarga	25	25	25	25	100	369.136.288	Proses Bisnis dan SOP	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Kualitas dan keterpaduan database Penanggulangan Kemiskinan belum Optimal	Tersedianya database pengentasan kemiskinan yang lengkap, terpadu dan terupdate	Cakupan Basis Data Terpadu	70 %	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	6	7	7	5	25	1.362.500	Proses Bisnis dan SOP	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinato-r	Pelak-sana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Kualitas dan keterpaduan database Penanggulangan Kemiskinan belum Optimal	Tersedianya database pengentasan kemiskinan yang lengkap, terpadu dan terupdate	Cakupan Basis Data Terpadu	70 %	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	unit usaha	90	247	123	72	532	182.209.364	Perencanaan dan Penganggaran	DKUKMPP	DKUKMPP dan Mitra
Keterpaduan Perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan belum optimal antar instansi dan lintas sektor	Terwujudnya keterpaduan Perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan	Dokumen teknis perencanaan program	6 dokumen	Menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan daerah dan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025	Rencana Aksi Tahunan	dokumen	1	-	-	-	1	8.000.000	Perencanaan dan Penganggaran	Bappeda	Bappeda dan PD
Keterpaduan Perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan belum optimal antar instansi dan lintas sektor	Terwujudnya keterpaduan Perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan	Dokumen teknis perencanaan program	6 dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	dokumen	1	1	2	1	5	843.649.872	Perencanaan dan Penganggaran	DPUPKP	DPUPKP dan Mitra
Keterpaduan Perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan belum optimal antar instansi dan lintas sektor	Terwujudnya keterpaduan Perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan	Dokumen teknis perencanaan program	6 dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	dokumen	2	2	1	1	6	716.674.872	Perencanaan dan Penganggaran	DPUPKP	DPUPKP dan Mitra

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinato-r	Pelak-sana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Keterpaduan Perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan belum optimal antar instansi dan lintas sektor	Terwujudnya keterpaduan perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan	Dokumen teknis perencanaan program	6 dokumen	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	dokumen	-	-	-	2	2	13.827.500	Perencanaan dan Penganggaran	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Profesionalitas SDM pengelola dan pelaksana program dan kegiatan pengentasan kemiskinan masih perlu ditingkatkan	Terwujudnya profesionalisme SDM pengelola dan pelaksana program pengentasan kemiskinan	SDM dan lembaga yang mendapatkan pelatihan/bimtek/diklat/dll	220 orang/lembaga	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	-	-	40	-	40	3.165.000	Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra
Profesionalitas SDM pengelola dan pelaksana program dan kegiatan pengentasan kemiskinan masih perlu ditingkatkan	Terwujudnya profesionalisme SDM pengelola dan pelaksana program pengentasan kemiskinan	SDM dan lembaga yang mendapatkan pelatihan/bimtek/diklat/dll	220 orang/lembaga	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga	15	15	15	15	60	595.118.971	Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial	Dinas Sosial, Lembaga Masy. dan Mitra
Profesionalitas SDM pengelola dan pelaksana program dan kegiatan pengentasan kemiskinan masih perlu ditingkatkan	Terwujudnya profesionalisme SDM pengelola dan pelaksana program pengentasan kemiskinan	SDM dan lembaga yang mendapatkan pelatihan/bimtek/diklat/dll	220 orang/lembaga	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	keluarga	10	15	10	15	50	58.700.000	Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinato-r	Pelak-sana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Profesionalitas SDM pengelola dan pelaksana program dan kegiatan pengentasan kemiskinan masih perlu ditingkatkan	Terwujudnya profesionalisme SDM pengelola dan pelaksana program pengentasan kemiskinan	SDM dan lembaga yang mendapatkan pelatihan/bimtek/diklat/dll	220 orang/lembaga	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	17	17	17	17	68	237.390.800	Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra
Profesionalitas SDM pengelola dan pelaksana program dan kegiatan pengentasan kemiskinan masih perlu ditingkatkan	Terwujudnya profesionalisme SDM pengelola dan pelaksana program pengentasan kemiskinan	SDM dan lembaga yang mendapatkan pelatihan/bimtek/diklat/dll	220 orang/lembaga	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	17	17	17	17	68	173.286.711	Sumber Daya Manusia	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Profesionalitas SDM pengelola dan pelaksana program dan kegiatan pengentasan kemiskinan masih perlu ditingkatkan	Terwujudnya profesionalisme SDM pengelola dan pelaksana program pengentasan kemiskinan	SDM dan lembaga yang mendapatkan pelatihan/bimtek/diklat/dll	220 orang/lembaga	Pelatihan kepemimpinan pengawas pengampu program	Jumlah ASN yang mendapatkan pelatihan kepemimpinan pengawas	orang	15	14	-	-	29	511.647.000	Sumber Daya Manusia	BKPSDM	BKPSDM
Profesionalitas SDM pengelola dan pelaksana program dan kegiatan pengentasan kemiskinan masih perlu ditingkatkan	Terwujudnya profesionalisme SDM pengelola dan pelaksana program pengentasan kemiskinan	SDM dan lembaga yang mendapatkan pelatihan/bimtek/diklat/dll	220 orang/lembaga	Pelatihan administrator pengampu program	Jumlah ASN yang mendapatkan pelatihan kepemimpinan administrator	orang	10	3	-	-	13	279.500.000	Sumber Daya Manusia	BKPSDM	BKPSDM
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang tepat	Kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan sosial berbasis individu dan keluarga	42 kegiatan	Melaksanakan pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial di Kalurahan	Pelayanan Puskesos di Kalurahan	persen	100	100	100	100	100	-	Teknologi dan Informasi	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinato-r	Pelak-sana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
	sasaran														
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang tepat sasaran	Kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan sosial berbasis individu dan keluarga	42 kegiatan	Melaksanakan Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Pelayanan SLRT di Kabupaten	persen	100	100	100	100	100	-	Teknologi dan Informasi	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang tepat sasaran	Kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan sosial berbasis individu dan keluarga	42 kegiatan	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	8.165.374.796	Lain-lain	Dinas Sosial	Dinas Sosial, Kalurahan dan Mitra
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang tepat sasaran	Kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan sosial berbasis individu dan keluarga	42 kegiatan	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	10	15	10	18	53	122.488.000	Lain-lain	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang tepat sasaran	Kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan sosial berbasis individu dan keluarga	42 kegiatan	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	orang	10	15	25	-	50	28.517.500	Lain-lain	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinato-r	Pelak-sana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang tepat sasaran	Kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan sosial berbasis individu dan keluarga	42 kegiatan	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20	25	25	25	95	179.695.000	Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang tepat sasaran	Kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan sosial berbasis individu dan keluarga	42 kegiatan	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	keluarga	-	-	-	3.508	3.508	2.727.529.954	Lain-lain	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang tepat sasaran	Kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan sosial berbasis individu dan keluarga	42 kegiatan	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	10	15	10	15	50	31.524.600	Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang tepat sasaran	Kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan sosial berbasis individu dan keluarga	42 kegiatan	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan	orang	25	25	25	25	100	303.178.110	Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinato-r	Pelak-sana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
				Kabupaten/Kota											
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang tepat sasaran	Kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan sosial berbasis individu dan keluarga	42 kegiatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penerima Manfaat PBI-APBD	orang	-	-	-	130.561	130.561	41.774.651.300	Lain-lain	Dinkes	Dinkes, Dinsos, Jamkesda dan pendamping TKSK
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang tepat sasaran	Kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan sosial berbasis individu dan keluarga	42 kegiatan	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	unit	1	1	1	1	1	1.070.558.780	Lain-lain	Dinkes	Dinkes
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang tepat sasaran	Kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan sosial berbasis individu dan keluarga	42 kegiatan	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	liter/detik	-	-	3	-	3	3.515.150.000	Lain-lain	DPUPKP	DPUPKP dan Mitra
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang tepat sasaran	Kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan sosial berbasis individu dan keluarga	42 kegiatan	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	rumah tangga	50	50	50	60	210	2.652.000.000	Lain-lain	DPUPKP	DPUPKP dan Mitra

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinato-r	Pelak-sana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang tepat sasaran	Kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan sosial berbasis individu dan keluarga	42 kegiatan	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang Terbangun	unit rumah	-	-	2	-	2	165.382.500	Lain-lain	DPUPKP	DPUPKP dan Mitra
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang tepat sasaran	Kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan sosial berbasis individu dan keluarga	42 kegiatan	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Terehabilitasi	unit rumah	-	-	12	13	25	449.132.500	Lain-lain	DPUPKP	DPUPKP dan Mitra
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang tepat sasaran	Kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan sosial berbasis individu dan keluarga	42 kegiatan	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	unit	-	-	10	10	20	700.000.000	Lain-lain	DPUPKP	DPUPKP dan Mitra
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang tepat sasaran	Kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan sosial berbasis individu dan keluarga	42 kegiatan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	unit rumah	-	10	15	48	73	898.886.000	Lain-lain	DPUPKP	DPUPKP dan Mitra
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang tepat sasaran	Kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan sosial berbasis individu dan keluarga	42 kegiatan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	95	150	120	-	365	119.225.000	Lain-lain	Disdikpora	Disdikpora dan Mitra

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinato-r	Pelak-sana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang tepat sasaran	Kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan sosial berbasis individu dan keluarga	42 kegiatan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	45	50	-	-	95	113.850.000	Lain-lain	Disdikpora	Disdikpora dan Mitra
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang tepat sasaran	Kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan sosial berbasis individu dan keluarga	42 kegiatan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	satuan pendidikan	-	-	15	15	30	5.251.650.000	Lain-lain	Disdikpora	Disdikpora dan Mitra
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang tepat sasaran	Kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan sosial berbasis individu dan keluarga	42 kegiatan	Koordinasi CSR dalam intervensi penanggulangan kemiskinan	Jumlah Perusahaan yang memberikan CSR untuk Penanggulangan Kemiskinan	perusahaan	-	10	-	-	10	9.500.000	Perencanaan dan Penganggaran	Bappeda	Bappeda dan Mitra
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang tepat sasaran	Kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan sosial berbasis individu dan keluarga	42 kegiatan	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang	orang	1.000	1.400	1.500	1.500	5.400	656.088.000	Lain-lain	BPBD	BPBD

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinato-r	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
					ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun										
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang tepat sasaran	Kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan sosial berbasis individu dan keluarga	42 kegiatan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	40	40	40	40	160	145.655.030	Proses Bisnis dan SOP	DP3AP2KB	DP3AP2KB
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	43 kegiatan	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	kelompok	-	13	-	13	26	989.441.500	Lain-lain	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan dan Mitra
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	43 kegiatan	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	orang	-	7	14	14	35	1.076.233.750	Lain-lain	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinato-r	Pelak-sana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	43 kegiatan	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	kelompok	-	-	18	18	36	128.572.000	Sumber Daya Manusia	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	43 kegiatan	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	pelaku usaha	-	2	4	4	10	110.290.000	Lain-lain	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	43 kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	dokumen	-	-	-	4	4	835.772.000	Sumber Daya Manusia	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Mitra
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	43 kegiatan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	kelompok	-	-	7	10	17	188.194.400	Sumber Daya Manusia	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinato-r	Pelak-sana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	43 kegiatan	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	orang	-	30	30	-	60	21.423.129.800	Sumber Daya Manusia	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Mitra
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	43 kegiatan	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	orang	-	200	200	170	570	57.545.635.400	Sumber Daya Manusia	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Mitra
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	43 kegiatan	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	orang	-	1.400	-	1.350	2.750	226.451.000	Sumber Daya Manusia	Disnakertrans	Disnakertrans dan Mitra
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	43 kegiatan	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	orang	-	-	-	60	60	152.821.500	Sumber Daya Manusia	Disnakertrans	Disnakertrans dan Mitra

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinato-r	Pelak-sana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	43 kegiatan	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	-	5.190	-	598	5.788	21.824.530.802	Sumber Daya Manusia	Disnakertrans	Disnakertrans dan Mitra
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	43 kegiatan	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	orang	50	50	50	50	200	56.375.000	Sumber Daya Manusia	Disnakertrans	Disnakertrans dan Mitra
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	43 kegiatan	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	kepala keluarga	-	-	-	3	3	373.877.812	Sumber Daya Manusia	Disnakertrans	Disnakertrans dan Mitra
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	43 kegiatan	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	orang	850	850	850	850	3.400	236.564.000	Sumber Daya Manusia	Disnakertrans	
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	43 kegiatan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	-	250	200	94	544	2.974.500.218	Sumber Daya Manusia	UPTD BLK	UPTD BLK dan Mitra
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	43 kegiatan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	unit usaha	-	54	285	-	339	182.209.364	Sumber Daya Manusia	DKUKMPP	DKUKMPP dan Mitra

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinato-r	Pelak-sana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	43 kegiatan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang	-	30	48	-	78	471.332.219	Sumber Daya Manusia	DKUKMPP	DKUKMPP dan Mitra
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	43 kegiatan	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitas	unit usaha	-	-	5	98	103	313.753.971	Sumber Daya Manusia	DKUKMPP	DKUKMPP dan Mitra
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	43 kegiatan	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Kewirausahaan yang Difasilitasi	orang	260	134	20	60	474	219.076.850	Sumber Daya Manusia	DKUKMPP	DKUKMPP dan Mitra
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	43 kegiatan	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	unit	-	50	-	-	50	399.516.250	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP dan Mitra
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	43 kegiatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	dokumen	-	-	-	1	1	528.019.400	Sumber Daya Manusia	DPMK	DPMK

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinato-r	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Pengawasan dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan secara komprehensif	Jumlah dokumen tata kelola dan hasil evaluasi program penanggulangan kemiskinan	3 dokumen	Penyusunan SOP Pengawasan Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah dokumen SOP Pengawasan Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan	dokumen	-	-	-	1	1	25.900.000	Proses Bisnis dan SOP	Inspektorat	Inspektorat
Pengawasan dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan secara komprehensif	Jumlah dokumen tata kelola dan hasil evaluasi program penanggulangan kemiskinan	3 dokumen	Pelaksanaan Audit Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan	dokumen	-	-	-	1	1	6.800.000	Proses Bisnis dan SOP	Inspektorat	Inspektorat
Pengawasan dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan secara komprehensif	Jumlah dokumen tata kelola dan hasil evaluasi program penanggulangan kemiskinan	3 dokumen	Penyusunan Manajemen Risiko Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Manajemen Risiko Program Penanggulangan Kemiskinan	dokumen	-	-	1	-	1	-	Proses Bisnis dan SOP	Inspektorat	Inspektorat

**Tabel 3. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Realisasi Investasi**

**Sasaran** : Meningkatnya Nilai Investasi

**Indikator** : Nilai Investasi

**Target** : 425 Miliar Rupiah

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksa-na
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Layanan perizinan dan non perizinan belum optimal	Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan.	Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan	99 %	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	pelaku usaha	450	450	450	450	1.800	311.600.016	Proses Bisnis dan SOP	DPMPTSP	DPMPTSP
Layanan perizinan dan non perizinan belum optimal	Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan.	Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan	99%	Sosialisasi dan fasilitasi pembuatan NIB di sentra industri Kab Bantul	Jumlah IKM yang difasilitasi pembuatan NIB	IKM	30	60	-	-	90	12.073.300	Proses Bisnis dan SOP	DPMPTSP	DKUKMPP
Layanan perizinan dan non perizinan belum optimal	Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan.	Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan	99%	Sosialisasi Perizinan Berusaha Sektor Industri	Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi	IKM	216	-	144	250	610	76.713.000	Proses Bisnis dan SOP	DPMPTSP	DKUKMPP
Layanan perizinan dan non perizinan belum optimal	Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan.	Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan	99%	Fasilitasi Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi perizinan	Unit usaha	-	28	-	-	28	8.101.850	Proses Bisnis dan SOP	DPMPTSP	DKUKMPP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Reklame sudah memenuhi kewajiban pembayaran pajak , namun belum memperoleh/mengurus izin penyelenggaraan	Sosialisasi reklame, FGD Reklame, Pendataan	Persentase permohonan pajak reklame dan perijinannya	100%	Melakukan integrasi pajak reklame dengan Ijin penyelenggaraan	Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame	dokumen	600	350	350	200	1.500	976.340.500	Proses Bisnis dan SOP	BPKPAD	BPKPAD
Belum optimalnya pemanfaatan data dan teknologi informasi penanaman modal	Meningkatkan pemanfaatan data dan teknologi informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan teknologi informasi penanaman modal	100%	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	dokumen	-	-	-	2	2	197.032.436	Teknologi dan Informasi	DPMPTSP	DPMPTSP, DISKOMINFO, DKUKMPP
kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan LKPM masih kurang	Meningkatnya pelaku usaha tertib LKPM (laporan Kegiatan penanaman modal)	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Tertib LKPM	22%	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	kegiatan usaha	14	36	44	28	122	10.625.000	Pengawasan	DPMPTSP	DPMPTSP, DKUKMPP
kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan LKPM masih kurang	Meningkatnya pelaku usaha tertib LKPM (laporan Kegiatan penanaman modal)	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Tertib LKPM	22%	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan	pelaku usaha	-	80	40	-	120	24.225.000	Sumber Daya Manusia	DPMPTSP	DPMPTSP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target				Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
					Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko										
potensi terjadinya perselisihan hubungan industrial	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Bimtek Hubungan Industrial, Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan Pada Perusahaan, Sosialisasi UMK, Workshop Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang Dicegah	20 perkara	Menciptakan iklim usaha yang kondusif	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang Dicegah	perkara	5	5	5	5	20	122.475.000	Sumber Daya Manusia	DPMPTSP	DPMPTSP, Disnakertrans, Bakesbangpol
potensi terjadinya perselisihan hubungan industrial	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Bimtek Hubungan Industrial, Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan Pada Perusahaan, Sosialisasi UMK, Workshop Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang Dicegah	20 perkara	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	kegiatan usaha	4	4	6	-	14	47.162.436	Pengawasan	DPMPTSP	DPMPTSP, DKUKMPP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target				Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Potensi terjadinya perselisihan hubungan industrial	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Bimtek Hubungan Industrial, Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan Pada Perusahaan, Sosialisasi UMK, Workshop Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang Dicegah	20 perkara	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	dokumen	-	-	-	1	1	6.000.000	Teknologi dan Informasi	DPMPTSP	DPMPTSP
Jangkauan promosi penanaman modal masih terbatas	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal	5,1%	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten	dokumen	-	-	2	1	3	186.767.236	Teknologi dan Informasi	DPMPTSP	DPMPTSP dan DKUKMPP
Tuntutan masyarakat akan pelayanan investasi yang mudah dan murah	Meningkatnya implementasi inovasi layanan investasi	Persentase capaian implementasi inovasi layanan Investasi	100%	Penerapan Inovasi GAMPIL ( Gerakan Melayani Perizinan Langsung )	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan / pendampingan langsung dalam mendapatkan izin usaha ( NIB/Nomor Induk Berusaha)	pelaku usaha	-	-	-	800	800	162.223.700	Inovasi	DPMPTSP	DPMPTSP
belum optimalnya kualitas aparatur penyelenggara penanaman modal	Meningkatnya kualitas aparatur penyelenggara penanaman modal	Nilai unsur Kompetensi dalam penilaian SKM	3,53	Bimbingan Teknis kepada aparatur penyelenggara penanaman modal	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi regulasi penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP	orang	-	80	-	-	80	67.600.100	Sumber Daya Manusia	DPMPTSP	DPMPTSP

**Tabel 4. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Mendorong Hilirisasi.**

**Sasaran** : Meningkatnya Produktivitas Sektor Olahan yang menjadi Unggulan Daerah

**Indikator** : Rasio PDRB Industri Pengolahan

**Target** : 14,10 %

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Layanan perizinan berusaha sektor industri belum optimal	Meningkatkan kualitas layanan perizinan berusaha sektor industri	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	100%	Sosialisasi perizinan berusaha sektor industri	Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi	IKM	216	-	144	250	610	46.027.800	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP
Layanan perizinan berusaha sektor industri belum optimal	Meningkatkan kualitas layanan perizinan berusaha sektor industri	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	100%	sosialisasi verifikasi pemenuhan persyaratan SKU sektor Perindustrian	Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi	IKM	-	-	-	20	20	2.328.200	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP
Layanan perizinan berusaha sektor industri belum optimal	Meningkatkan kualitas layanan perizinan berusaha sektor industri	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	100%	Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan persyaratan SKU sektor Perindustrian	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi	IKM	-	2	2	-	4	2.600.000	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP
Layanan perizinan berusaha sektor industri belum optimal	Meningkatkan kualitas layanan perizinan berusaha sektor industri	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	100%	Fasilitasi pembuatan dan pengisian akun SII Nas	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi	IKM	-	50	50	120	220	33.445.000	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP
Layanan perizinan berusaha sektor industri belum optimal	Meningkatkan kualitas layanan perizinan berusaha sektor industri	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	100%	Fasilitasi sertifikasi TKDN IK melalui akun SII Nas	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi	IKM	-	25	-	25	50	10.989.000	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP
Layanan perizinan berusaha sektor industri belum optimal	Meningkatkan kualitas layanan perizinan berusaha sektor industri	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	100%	Fasilitasi Pembuatan NIB bagi UMKM	Jumlah Dokumen NIB	NIB	300	560	330	240	1.430	458.823.716	Inovasi	DKUKMPP	DPMPTSP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Layanan perizinan berusaha sektor industri belum optimal	Meningkatkan kualitas layanan perizinan berusaha sektor industri	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	100%	Publikasi promosi penanaman modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen	-	-	2	1	3	129.417.236	Teknologi dan Informasi	DKUKMPP	DPMPTSP
Layanan perizinan berusaha sektor industri belum optimal	Meningkatkan kualitas layanan perizinan berusaha sektor industri	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	100%	Pemberian insentif kemudahan perizinan	Jumlah Dokumen Fasilitasi	Dokumen	-	1	-	1	2	6.000.000	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DPMPTSP
Layanan perizinan berusaha sektor industri belum optimal	Meningkatkan kualitas layanan perizinan berusaha sektor industri	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	100%	Insentif pengurangan PBB	Jumlah wajib pajak pbb yang diberikan insentif pengurangan PBB	Dokumen	10	10	10	-	30	17.000.000	Inovasi	DKUKMPP	BPKPAD
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Pelatihan Inovasi IKM	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi pelatihan	IKM	20	108	18	-	146	266.000.000	Sumber Daya Manusia	DKUKMPP	DKUKMPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Pelatihan Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi pelatihan	IKM	-	-	18	-	18	37.000.000	Sumber Daya Manusia	DKUKMPP	DKUKMPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Pelatihan Olahan Makanan	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi pelatihan	IKM	-	-	54	-	54	110.250.000	Sumber Daya Manusia	DKUKMPP	DKUKMPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Pelatihan Anggota Dekranasda	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi pelatihan	IKM	-	20	-	-	20	8.807.000	Sumber Daya Manusia	DKUKMPP	DKUKMPP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Sosialisasi Pengembangan Batik Nitik	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi sosialisasi	IKM	-	-	72	-	72	15.854.980	Sumber Daya Manusia	DKUKMPP	DKUKMPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Pelatihan Pengembangan Inovasi Desain Produk Fashion	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi pelatihan	IKM	-	-	-	30	30	28.782.000	Sumber Daya Manusia	DKUKMPP	DKUKMPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Pameran Gebyar Kriya Nusantara	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi pameran	IKM	-	-	-	2	2	57.180.000	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Pelatihan Industri Pengembangan Wira Usaha Baru	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi pelatihan	IKM	36	90	-	-	126	208.411.700	Sumber Daya Manusia	DKUKMPP	DKUKMPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Pelatihan Produk IKM	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi pelatihan	IKM	-	54	144	-	198	292.957.500	Sumber Daya Manusia	DKUKMPP	DKUKMPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Fasilitasi Sertifikasi Halal	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi Halal	IKM	-	-	25	-	25	142.332.950	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Fasilitasi Sertifikasi HKI	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi HKI	IKM	-	-	25	-	25	56.082.950	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Pameran Inacraft	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi pameran	IKM	5	-	-	-	5	149.013.088	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Sosialisasi Sertifikasi Halal	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi sosialisasi	IKM	-	88	-	-	88	15.854.980	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Pameran Ifex	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	pelaku usaha	4	-	-	-	4	79.071.750	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Pameran Jiffina	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	pelaku usaha	4	-	-	-	4	72.121.750	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Sosialisasi perizinan berusaha sektor industri	Jumlah kegiatan sosialisasi perizinan sektor industri kecil	IKM	144	-	-	100	244	50.685.200	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Pelatihan Tata Boga (3x)	Jumlah unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap usaha mikro	Unit Usaha	-	54	-	-	54	82.597.500	Sumber Daya Manusia	DKUKMPP	DKUKMPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Sosialisasi Kewirausahaan UMKM (9x)	Jumlah UMKM yang difasilitasi	Unit Usaha	240	108	-	-	348	73.732.470	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	-	28	-	-	28	8.101.850	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Pelatihan Pengembangan UMKM (3x)	Jumlah UMKM yang difasilitasi	Unit Usaha	-	54	-	-	54	83.004.120	Sumber Daya Manusia	DKUKMPP	DKUKMPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Sosialisasi perizinan sektor industri kecil	Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi	IKM	144	-	-	250	394	80.685.200	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Pelatihan Manajemen Ritel	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Pelatihan	Unit Usaha	25	25	25	-	75	28.340.100	Sumber Daya Manusia	DKUKMPP	DKUKMPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Kemitraan UMKM dengan Pelaku Usaha Besar	Jumlah UMKM yang bermitra	Unit Usaha	25	-	-	-	25	12.084.500	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Pameran Bantul Creative Expo	Jumlah UMKM yang difasilitasi	UMKM	-	-	274	-	274	463.688.200	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Festival Klangenan	Jumlah UMKM yang menikuti event	UMKM	-	50	-	-	50	400.000.000	Lain-lain	DKUKMPP	DKUKMPP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Konservasi Lahan Kebun Buah Mangunan (DKPP)	Jumlah sarana (pupuk dan pestisida) yang diberikan	Kg	-	6.300	-	-	6.300	53.240.000	Inovasi	DKUKMPP	DKPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Konservasi Lahan Kebun Buah Nawungan (DKPP)	Jumlah sarana (pupuk dan pestisida) yang diberikan	Kg	-	-	-	8.218	8.218	106.600.000	Inovasi	DKUKMPP	DKPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Konservasi Lahan Kebun Buah Nawungan (DKPP)	Jumlah sarana (bibit durian) yang diberikan	batang	-	-	-	168	168	84.000.000	Inovasi	DKUKMPP	DKPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Pelatihan Optimalisasi Potensi Lokal (DKPP)	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Optimalisasi Potensi Lokal	orang	-	140	200	75	415	301.379.500	Sumber Daya Manusia	DKUKMPP	DKPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Pelatihan Olahan Pangan Lokal	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan olahan pangan lokal	orang	-	25	100	40	165	175.000.000	Sumber Daya Manusia	DKUKMPP	DKPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan (DKPP)	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Pemanfaatan Pekarangan	orang	-	120	150	400	670	675.000.000	Sumber Daya Manusia	DKUKMPP	DKPP
Daya saing produk belum optimal	Meningkatkan daya saing produk	Cakupan UMKM yang meningkat daya saingnya	9,93%	Pelatihan Pasca Panen (DKPP)	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pascapanen	orang	100	100	-	25	225	145.089.900	Sumber Daya Manusia	DKUKMPP	DKPP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
implementasi Regulasi perdagangan belum optimal	Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi implementasi regulasi	Prosentase gudang yang berizin	53,31%	Verifikasi Teknis Perizinan Perizinan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Permohonan Perizinan yang diverifikasi	Unit Usaha	2	2	2	2	8	3.045.000	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUMPP
implementasi Regulasi perdagangan belum optimal	Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi implementasi regulasi	Prosentase gudang yang berizin	53,31%	Pengawasan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Gudang yang diawasi	Unit Usaha	2	2	2	2	8	3.010.000	Pengawasan	DKUKMPP	DKUMPP
implementasi Regulasi perdagangan belum optimal	Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi implementasi regulasi	Prosentase gudang yang berizin	53,31%	Penyusunan Raperda Gudang	Dokumen Raperda Gudang	Dokumen	-	-	-	1	1	11.050.000	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUMPP
implementasi Regulasi perdagangan belum optimal	Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi implementasi regulasi	Prosentase gudang yang berizin	53,31%	Sosialisasi Pengelolaan Gudang Sistem Resi Gudang (SRG)	Laporan Hasil Sosialisasi	Dokumen	-	1	-	-	1	6.967.000	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP

**Tabel 5. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Mendukung Ketahanan Pangan**

**Sasaran** : Meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang mendukung ketahanan pangan

**Indikator** : Indeks Ketahanan Pangan

**Target** : 83,62

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) belum optimal;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi	Pelatihan Budidaya Ayam/Itik Unggul Lokal Petelur	Kelompok	12	7	9	4	32	760.283.000	Sumber Daya Manusia	DKPP	DKPP
Pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) belum optimal;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga	Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan	KWT	-	7	-	20	27	620.000.000	Sumber Daya Manusia	DKPP	DKPP
Pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) belum optimal;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga	Jumlah Kader KB yang melaksanakan kegiatan UPPKA (Usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor)	Kader / Apsektor KB	221	221	221	220	883	-	Sumber Daya Manusia	DKPP	DP3APPKB
Pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) belum optimal;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai <i>early warning system (EWS)</i> tetap aktif terpantau dan terlaporkan	Jumlah Gerakan Pangan Murah	Kali	1	-	1	1	3	35.125.000	Lain-lain	DKPP	DKPP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) belum optimal;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai <i>early warning system (EWS)</i> tetap aktif terpantau dan terlaporkan	Penyelenggaraan Promosi/Pameran Pertanian	kali	-	-	1	-	1	44.250.000	Lain-lain	DKPP	DKPP
Pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) belum optimal;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai <i>early warning system (EWS)</i> tetap aktif terpantau dan terlaporkan	Penyelenggaraan Promosi/Pameran Ternak	kali	-	-	1	1	2	250.000.000	Lain-lain	DKPP	DKPP
Pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) belum optimal;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai <i>early warning system (EWS)</i> tetap aktif terpantau dan terlaporkan	Penyelenggaraan Pasar Tani	kali	11	11	14	14	50	7.675.500	Lain-lain	DKPP	DKPP
Pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) belum optimal;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai <i>early warning system (EWS)</i> tetap aktif terpantau dan terlaporkan	Jumlah pemantauan ketersediaan dan harga yang dimanfaatkan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan pokok/strategis di tingkat distributor/pelaku usaha	kali	3	3	3	3	12	8.037.500	Pengawasan	DKPP	DKUKMPP
Pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai <i>early warning system (EWS)</i> tetap aktif terpantau dan terlaporkan	Jumlah pemantauan ketersediaan dan harga yang dimanfaatkan untuk menjaga stabilisasi	kali	78	78	78	79	313	17.092.500	Pengawasan	DKPP	DKUKMPP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
belum optimal;				terlaporkan	pasokan dan harga komoditas pangan pokok/strategis di tingkat konsumen (5 pasar)										
Pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) belum optimal;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai <i>early warning system (EWS)</i> tetap aktif terpantau dan terlaporkan	Tersedianya sistem informasi pemantauan harga dan pasokan komoditas pangan pokok/strategis	Jumlah	1	-	-	-	1	8.500.000	Inovasi	DKPP	DKUKMPP
Pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) belum optimal;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai <i>early warning system (EWS)</i> tetap aktif terpantau dan terlaporkan	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten	Jumlah	2	4	1	2	9	33.987.600	Pengawasan	DKPP	DKUKMPP
Pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) belum optimal;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai <i>early warning system (EWS)</i> tetap aktif terpantau dan terlaporkan	Jumlah unit distribusi pangan pokok	Unit	-	18	-	-	18	4.250.000	Pengawasan	DKPP	DKPP
Pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) belum optimal;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai <i>early warning system (EWS)</i> tetap aktif terpantau dan terlaporkan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	3	3	3	3	12	85.000.000	Pengawasan	DKPP	DKPP
Pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai <i>early warning system (EWS)</i> tetap aktif terpantau dan	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Laporan	-	-	-	1	1	1.562.500	Pengawasan	DKPP	DKPP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
belum optimal;				terlaporkan											
Pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) belum optimal;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan	Tersedianya data/informasi proyeksi neraca pangan	Dokumen	-	-	-	1	1	-	Pengawasan	DKPP	DKPP
Pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) belum optimal;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Membina UMKM/Koperasi/ BUMDes dalam pengembangan industri pangan	Pendampingan Koperasi Merah Putih	Koperasi	-	-	-	3	3	600.000	Pengawasan	DKPP	DKUKMPP
Pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) belum optimal;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Membina UMKM/Koperasi/ BUMDes dalam pengembangan industri pangan	Pembiayaan LKMA	Unit	-	1	-	-	1	7.862.500	Lain-lain	DKPP	DKPP
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan	Jumlah pengawasan pangan aman PSAT	Kali	1	-	4	-	5	10.775.000	Pengawasan	DKPP	DKPP
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan	Bimtek hewan qurban	Kali	-	2	-	-	2	53.321.500	Pengawasan	DKPP	DKPP
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah	Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang diuji yang memenuhi syarat keamanan	Sampel	-	160	-	-	168	9.900.000	Pengawasan	DKPP	DKPP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total					
				(OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan	pangan											
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Penguatan kapasitas pengawasan bagi Balai Veteriner dalam rangka keamanan pangan asal hewan	Jumlah pangan asal hewan yang diuji yang memenuhi syarat keamanan pangan	Sampel	6	8	6	4	24	6.302.400	Pengawasan	DKPP	DKPP	
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Penguatan kapasitas pengawasan bagi lembaga pengawasan mutu hasil perikanan dalam rangka keamanan pangan asal ikan	Jumlah dokumen penguatan kapasitas pengawasan bagi lembaga pengawasan mutu hasil perikanan dalam rangka keamanan pangan asal ikan	Dokumen	-	-	-	1	1	397.177.600	Pengawasan	DKPP	DKP	
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Penguatan kapasitas pedagang pasar dan petugas pasar dalam rangka penjaminan keamanan pangan dan peningkatan kandungan gizi produk pangan olahan	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan dalam rangka menjamin keamanan pangan	orang	-	-	60	-	60	8.350.000	Sumber Daya Manusia	DKPP	DKUKMPP	
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan (perempuan, gelandangan,	Jumlah penerima manfaat Boga Sehat, menu ramah lansia	orang	1.112	-	-	-	1.112	7.355.880.000	Sumber Daya Manusia	DKPP	Dinsos	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
				penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)											
Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) masih ada;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/kabupaten/kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (beras)	Ton	-	57.861	-	-	57.861	100.000.000	Perencanaan dan Penganggaran	DKPP	DKPP
Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) masih ada;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/kabupaten/kota	Jumlah kelompok yang memperoleh fasilitasi kegiatan cadangan pangan masyarakat	Kelompok	-	-	1	-	1	50.000.000	Sumber Daya Manusia	DKPP	DKPP
Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) masih ada;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Membangun lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes)	Jumlah lumbung pangan yang operasional	Unit	-	-	29	-	29	2.337.500	Pengawasan	DKPP	DKPP
Wilayah yang terindikasi rentan pangan	Meningkatnya produktivitas dan	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa	Terlaksananya sosialisasi kebijakan prioritas	Kali	-	-	-	75	75	-	Sumber Daya Manusia	DKPP	DPMKal

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) masih ada;	ketersediaan pangan hasil pertanian			dalam mengolah pangan lokal	penggunaan dana desa untuk mendukung ketahanan pangan										
Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) masih ada;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi	Jumlah desa rentan pangan prioritas 1-3	Jumlah Desa	-	-	-	1	1	13.827.500	Pengawasan	DKPP	DKPP
Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) masih ada;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi	Jumlah desa mandiri pangan yang mendapatkan pendampingan pembinaan	Jumlah Desa	2	4	7	5	18	17.290.000	Pengawasan	DKPP	DKPP
Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) masih ada;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi	Pemberian Terapi Pangan Khusus Media Khusus untuk Balita Malnutrisi	Anak	-	-	-	132	132	341.744.000	Lain-lain	DKPP	Dinkes

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) masih ada;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi	Pemberian Makanan Tambahan	Orang/Hari	-	600	1.200	-	1.800	45.000.000	Lain-lain	DKPP	DKPP
Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) masih ada;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Pengembangan sistem logistik pangan melalui penyediaan data	Tersedianya data skor PPH ketersediaan	Dokumen	-	-	-	1	1	5.390.500	Perencanaan dan Penganggaran	DKPP	DKPP
Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) masih ada;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Memaksimalkan pemanfaatan peta rawan pangan	Pendampingan dalam pemanfaatan informasi peta rawan pangan untuk pengembangan kebijakan ketahanan pangan	kali	-	-	-	1	1	3.087.500	Perencanaan dan Penganggaran	DKPP	DKPP
Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA (Food Security	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Memaksimalkan pemanfaatan peta rawan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen	-	-	-	2	2	13.827.500	Perencanaan dan Penganggaran	DKPP	DKPP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
and Vulnerability Atlas) masih ada;															
Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) masih ada;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Melaksanakan kegiatan kampanye pangan	Sosialisasi pangan B2SA	Kali	-	1	-	1	2	12.966.000	Sumber Daya Manusia	DKPP	DKPP
Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) masih ada;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Melakukan penguatan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)	Jumlah kampanye gerakan gemar makan ikan (gemarikan)	Kali	3	3	3	10	19	565.373.900	Sumber Daya Manusia	DKPP	DKP
Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) masih ada;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi food waste	Pelatihan pengelolaan sampah	kali	-	-	17	5	22	614.064.000	Sumber Daya Manusia	DKPP	DLH
Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi food waste	Pendampingan pelatihan pengelolaan sampah	lokasi	765	765	765	765	3.060	600.000.000	Sumber Daya Manusia	DKPP	DLH

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
dan kerentanan pangan/FSVA ( <i>Food Security and Vulnerability Atlas</i> ) masih ada;															
Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA ( <i>Food Security and Vulnerability Atlas</i> ) masih ada;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi food waste	Sosialisasi pengelolaan sampah	kali	-	25	62	28	115	912.141.000	Sumber Daya Manusia	DKPP	DLH
Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA ( <i>Food Security and Vulnerability Atlas</i> ) masih ada;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi food waste	Sosialisasi dengan tema food waste	kali	-	-	-	1	1	1.425.000	Sumber Daya Manusia	DKPP	DKPP
Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA ( <i>Food Security and Vulnerability Atlas</i> ) masih ada;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi food waste	Fokus Grup Diskusi dengan tema "Pengendalian Food Waste"	kali	-	1	-	-	1	6.175.000	Pengawasan	DKPP	Bappeda

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA ( <i>Food Security and Vulnerability Atlas</i> ) masih ada;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Mendorong peningkatan produk pangan olahan bersertifikat	Jumlah fasilitasi pengajuan sertifikasi halal pada IKM	IKM	-	-	25	-	25	142.332.950	Proses Bisnis dan SOP	DKPP	DKUKMPP
Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA ( <i>Food Security and Vulnerability Atlas</i> ) masih ada;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan stunting	Jumlah kegiatan koordinasi pembangunan pangan dan gizi lintas sektor/pemangku kepentingan	kali	-	-	1	-	1	850.000	Perencanaan dan Penganggaran	DKPP	Bappeda
Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA ( <i>Food Security and Vulnerability Atlas</i> ) masih ada;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam <i>scaling up</i> program pangan dan gizi di pusat dan daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dengan mitra lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam <i>scaling up</i> program pangan dan gizi.	kali	-	-	3	-	3	2.500.000	Perencanaan dan Penganggaran	DKPP	Bappeda
Masih rendahnya produktifitas dan ketersediaan pangan hasil	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas)	0,56%	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang	Padi	Ha	7.919,19	9.042,20	5.736,04	11.848,57	34.546,00	-	Lain-lain	DKPP	DKPP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
	pertanian	utama) (%)		beragam											
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Jagung	Ha	65,00	757,50	1.658,50	53,00	2.534,00	-	Lain-lain	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Kedelai	Ha	-	114,00	24,00	-	138,00	-	Lain-lain	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Bawang Merah	Ha	277,80	51,65	-	-	329,45	-	Lain-lain	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Cabe	Ha	39,05	228,00	-	-	267,00	-	Lain-lain	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Kelapa	Ha	9.397,99	9.267,67	-	-	18.665,66	-	Lain-lain	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Kakao	Ha	77,80	77,80	-	-	155,60	-	Lain-lain	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Ubi Jalar	Ha	6	23	16	1	46	-	Lain-lain	DKPP	DKPP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Ubi kayu	Ha	13	5	-	143	161	-	Lain-lain	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/ kota	Produksi Padi	Ton	49.724,59	56.775,97	36.016,60	743.971,71	886.488,87	-	Lain-lain	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/ kota	Produksi Jagung	Ton	415,09	4.837,40	10.591,18	3.384,58	19.228,25	-	Lain-lain	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/ kota	Produksi Kedelai	Ton		201,32	42,38	-	243,70	-	Lain-lain	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/ kota	Produksi Cabai	Ton	108,58	290,36	-	-	398,94	-	Lain-lain	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/ kota	Produksi Bawang Merah	Ton	234,47	4.587,49	-	-	4.821,96	-	Lain-lain	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/ kota	Produksi Kelapa	Ton	2.558,62	2.439,21	-	-	4.997,83	-	Lain-lain	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas	Meningkatnya produktivitas dan	Pertumbuhan produksi sektor	0,56%	Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan	Produksi Kakao	Ton	0,47	0,45	-	-	0,92	-	Lain-lain	DKPP	DKPP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total					
hasil pertanian	ketersediaan pangan hasil pertanian	pertanian (komoditas utama) (%)		hewani, dan pangan lokal di setiap kab/ kota												
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/ kota	Produksi Ubi Jalar	Ton	62,11	238,10	165,63	103,52	569,36	-	Lain-lain	DKPP	DKPP	
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/ kota	Produksi Ubi Kayu	Ton	180,86	69,56	-	19.894,16	20.144,58	-	Lain-lain	DKPP	DKPP	
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/ kota	Produksi Daging	Kg	3.916.864	4.005.275	4.038.888	4.272.589	16.233.616	1.100.000	Lain-lain	DKPP	DKPP	
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/ kota	Produksi Telur	Kg	1.882.478	1.942.275	1.995.393	2.059.899	7.880.045	1.100.000	Lain-lain	DKPP	DKPP	
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/ kota	Jumlah pemotongan hewan	Ekor	312	312	312	314	1.250	234.254.860	Lain-lain	DKPP	DKPP	
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Meningkatkan kesehatan hewan dalam mendukung produksi pangan hewani	Jumlah pelayanan kesehatan hewan	Ekor	5.000	8.000	12.000	15.000	40.000	286.220.800	Lain-lain	DKPP	DKPP	
Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Optimalisasi sistem produksi pangan melalui <i>urban farming, integrated farming</i> maupun	Pelatihan Taruna Tani dengan tema Pertanian Terpadu/Integrate d Farming	Kelompok	1	-	-	-	1	25.000.000	Sumber Daya Manusia	DKPP	DKPP	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total					
				smart farming												
Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Optimalisasi sistem produksi pangan melalui <i>urban farming, integrated farming</i> maupun <i>smart farming</i>	Luasan usaha tani dengan elektrifikasi	paket	-	-	-	101	101	252.500.000	Teknologi dan Informasi	DKPP	DKPP	
Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Optimalisasi sistem produksi pangan melalui <i>urban farming, integrated farming</i> maupun <i>smart farming</i>	Gerakan pengendalian OPT	Kali	4	8	12	-	24	10.500.000	Teknologi dan Informasi	DKPP	DKPP	
Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Fasilitasi pemerintah daerah untuk meningkatkan penyediaan benih/bibit	Produksi benih bersertifikat	Ton	-	26.755	-	-	55.029	965.050.552	Lain-lain	DKPP	UPTD BBP	
Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Fasilitasi pemerintah daerah untuk meningkatkan penyediaan benih/bibit	Produksi bibit ternak	Ekor	3.920	3.922	3.923	3.920	15.685	100.000.000	Lain-lain	DKPP	DKPP	
Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Mengembangkan pertanian modern ( <i>smart farming</i> ) untuk mengurangi <i>food loss</i>	Pelatihan pascapanen, pengolahan hasil dan pemasaran	Kelompok	4	4	-	-	8	129.736.900	Sumber Daya Manusia	DKPP	DKPP	
Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Mengembangkan pertanian modern ( <i>smart farming</i> ) untuk mengurangi <i>food loss</i>	Sosialisasi food loss	Kali	-	-	-	1	1	1.425.000	Sumber Daya Manusia	DKPP	DKPP	
Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan,	Penyusunan pola dan tata tanam	Jumlah	1	-	-	-	1	3.400.000	Sumber Daya Manusia	DKPP	DPUPKP	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total					
				dan peternak terkait												
Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait	Sosialisasi tata tanam dan adaptasi iklim	Kali	-	1	-	-	1	900.000	Sumber Daya Manusia	DKPP	DKPP	
Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait	Sosialisasi peduli ASUH dan Promosi Produk Peternakan	Lokasi	-	6	-	-	6	46.050.000	Sumber Daya Manusia	DKPP	DKPP	
Alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Perubahan Perda lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	perda	-	-	-	1	1	86.674.500	Pengawasan	DKPP	DKPP	
Alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Sosialisasi Perda Perlindungan LP2B	kali	-	4	-	-	4	31.910.600	Pengawasan	DKPP	DKPP	
Ketersediaan sarana, prasarana, dan teknologi pertanian masih terbatas;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Mendorong penyediaan sarana dan prasarana pertanian	Jumlah alat mesin pertanian	Unit	-	68	-	-	68	299.000.000	Teknologi dan Informasi	DKPP	DKPP	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Ketersediaan sarana, prasarana, dan teknologi pertanian masih terbatas;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Mendorong penyediaan sarana dan prasarana pertanian	Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi tersier	Unit	-	-	12	-	12	1.120.800.000	Lain-lain	DKPP	DKPP
Ketersediaan sarana, prasarana, dan teknologi pertanian masih terbatas;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Mendorong penyediaan sarana dan prasarana pertanian	Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder	Unit	15	-	-	-	15	8.805.710.877	Lain-lain	DKPP	DPUPKP
Ketersediaan sarana, prasarana, dan teknologi pertanian masih terbatas;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Mendorong penyediaan sarana dan prasarana pertanian	Jumlah pestisida	Paket	-	56	-	20	76	38.000.000	Lain-lain	DKPP	DKPP
Ketersediaan sarana, prasarana, dan teknologi pertanian masih terbatas;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,56%	Mendorong penyediaan sarana dan prasarana pertanian	Jumlah pupuk	Kg	-	6.720	5.000	8.150	19.870	245.040.000	Lain-lain	DKPP	DKPP

**Tabel 6. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Mendorong Peningkatan Mutu dan Akses Layanan Kesehatan**

**Sasaran** : Meningkatnya pelayanan kesehatan yang merata, aman dan bermutu kepada setiap masyarakat

**Indikator** : Umur Harapan Hidup

**Target** : 74,86 Tahun

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksa-na
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Masih Tingginya prevalensi stunting	Penurunan Stunting	Prevalensi stunting		Pemeriksaan balita stunting dan konseling ibu balita stunting oleh dokter ahli (Sp.A) di puskesmas	Jumlah puskesmas melaksanakan pemeriksaan balita stunting dan konseling ibu balita stunting oleh dokter ahli (Sp.A)	Puskesmas	-	4	20	27	27	40.500.000	Lain-lain	DINKES	DINKES
Masih Tingginya prevalensi stunting	Penurunan Stunting	Prevalensi stunting	8,34%	Pemberian Terapi Pangan Khusus Medis Khusus untuk Balita Malnutrisi	Jumlah balita malnutrisi mendapatkan Terapi Pangan Khusus Medis Khusus	Orang	-	44	44	132	132	341.744.000	Lain-lain	DINKES	DINKES
Masih Tingginya prevalensi stunting	Penurunan Stunting	Prevalensi stunting	8,34%	Peningkatan Kapasitas petugas gizi	Jumlah petugas gizi yang memperoleh bimbingan teknis program gizi	Orang	-	21	42	63	63	5.482.500	Sumber Daya Manusia	DINKES	DINKES
Masih Tingginya prevalensi stunting	Penurunan Stunting	Prevalensi stunting	8,34%	kegiatan Pendampingan Keluarga Resiko Stunting oleh Kader TPK	Jumlah keluarga yang beresiko stunting yang didampingi oleh Kader TPK	keluarga	4.790	4.790	4.790	4.790	19.160	2.679.600.000	Sumber Daya Manusia	DP3AP2KB	DP3AP2KB
Masih Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)	Penurunan Angka Kematian Ibu (IBU)	Angka Kematian Ibu (IBU)	84%	Peningkatan Kapasitas petugas KIA	jumlah petugas yang telah terlatih pelayanan KIA	Orang	60	130	15	-	205	262.407.500	Sumber Daya Manusia	DINKES	DINKES

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksa-na
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Masih Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)	Penurunan Angka Kematian Ibu (IBU)	Angka Kematian Ibu (IBU)	84%	Peningkatan Jumlah Puskesmas mampu tatalaksana Gawat darurat maternal neonatal	Jumlah puskemas mampu tatalaksana Gawat darurat maternal neonatal	Puskesmas	-	12	9	6	27	26.325.000	Lain-lain	DINKES	DINKES
Masih Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)	Penurunan Angka Kematian Ibu (IBU)	Angka Kematian Ibu (IBU)	84%	Optimalisasi sistem Informasi tentang kesehatan Ibu anak	Integrasi/bridging Sistem Informasi kesehatan ibu anak dengan simpus	Aplikasi	-	-	-	1	1	12.000.000	Teknologi dan Informasi	DINKES	DINKES
Masih Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)	Penurunan Angka Kematian Ibu (IBU)	Angka Kematian Ibu (IBU)	84%	Optimalisasi sistem Informasi tentang kesehatan Ibu anak	persentase faskes yang terorientasi sistem informasi kesehatan ibu dan anak	persen	40	-	-	-	40	4.900.000	Sumber Daya Manusia	DINKES	DINKES
Masih Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)	Penurunan Angka Kematian Ibu (IBU)	Angka Kematian Ibu (IBU)	84%	Optimalisasi Sistem Informasi Rujukan Maternal	Jumlah Fasyankes yang mengimplementasikan "Siaga Bunda"	Fasilitas layanan kesehatan	1	5	6	15	27	-	Inovasi	DINKES	DINKES
Capaian Penemuan Kasus Tuberkulosis masih dibawah target nasional	Peningkatan Penemuan Tuberkulosis	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis	90%	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam penanggulangan TBC	Jumlah petugas yang terlatih Program Penanggulangan TBC	petugas	-	-	50	-	50	2.500.000	Sumber Daya Manusia	DINKES	DINKES
Capaian Penemuan Kasus Tuberkulosis masih dibawah target nasional	Peningkatan Penemuan Tuberkulosis	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis	90%	Penyediaan data TBC yang reliable	Jumlah faskes yang dilakukan validasi data/sisir kasus TBC	Fasilitas kesehatan	43	43	43	43	43	8.500.000	Pengawasan	DINKES	DINKES
Capaian Penemuan Kasus Tuberkulosis masih dibawah	Peningkatan Penemuan Tuberkulosis	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis	90%	Penguatan metode skrining TBC	Terlaksananya Rujukan Skrining TBC dengan Rongent pada kontak serumah TBC	orang	-	-	50	100	150	18.075.000	Proses Bisnis dan SOP	DINKES	DINKES

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksa-na
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
target nasional															
Capaian Penemuan Penemuan Kasus Tuberkulosis masih dibawah target nasional	Peningkatan Penemuan Kasus Tuberkulosis	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis	90%	Pemenuhan dan pengelolaan logistik TBC berbasis aplikasi	Tersedianya Cartridge TCM	pcs	-	-	-	11.150	11.050	2.112.185.400	Lain-lain	DINKES	DINKES
Cakupan Cek Kesehatan Gratis masih rendah	Meningkatnya Cakupan Cek Kesehatan Gratis	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	36% / Jumlah penduduk	Akselerasi CKG paket cepat dengan sasaran prioritas Bayi/Balita, anak sekolah, skrining PTM, skrining BPJS, layanan klaster di Puskesmas, event baik kalurahan/kapanewon/kabupaten	Cakupan penduduk yang mendapatkan CKG	Persen	1	5	10	15	31	50.000.000	Inovasi	DINKES	DINKES
Cakupan Cek Kesehatan Gratis masih rendah	Meningkatnya Cakupan Cek Kesehatan Gratis	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	36% / Jumlah penduduk	Digitalisasi sistem Informasi yang mendukung pelaksanaan CKG	Jumlah Aplikasi yang terbridging dengan Simpus (DGS)	Aplikasi	2	1	-	2	5	-	Inovasi	DINKES	DINKES
Cakupan Cek Kesehatan Gratis masih rendah	Meningkatnya Cakupan Cek Kesehatan Gratis	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	36% / Jumlah penduduk	Cakupan SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat literasi digital	Prosentase SDM Kesehatan yang telah mendapatkan sertifikat literasi digital	Persen	-	-	35	55	90	-	Sumber Daya Manusia	DINKES	DINKES

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Belum semua warga bantul memiliki jaminan kesehatan	Meningkatkan cakupan kepesertaan masyarakat Bantul dalam program jaminan kesehatan agar seluruh penduduk terlindungi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persentase penduduk Bantul yang belum terdaftar sebagai peserta JKN	98,56%	Mengoptimalkan perluasan kepersertaan Jaminan Kesehatan	Persentase peningkatan kepersertaan JKN di Kabupaten Bantul	Persen	-	-	-	98,56	98,56	41.774.651.300	Perencanaan dan Penganggaran	DINKES	DINKES, DINSOS, DISDUK-CAPIL, DISNA-KERTRANS
PHBS pada tatanan rumah tangga masih rendah	Peningkatan PHBS pada tatanan Rumah Tangga	Persentase PHBS pada tatanan rumah tangga	78%	Promosi dan edukasi PHBS terutama masalah merokok, penguatan satgas KTR	Prosentase anggota keluarga tidak merokok dalam rumah	Persen	-	-	-	78	78	10.850.000	Perencanaan dan Penganggaran	DINKES	DINKES

**Tabel 7. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan**

**Sasaran** : Meningkatnya akses, kualitas dan mutu pendidikan

**Indikator** : Angka Harapan Lama Sekolah

**Target** : 15,7 Tahun

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Hasil Asesmen Nasional turun karena kualitas pembelajaran kurang optimal sehingga hasil literasi menurun	Meningkatnya kualitas pembelajaran sehingga capaian literasi meningkat	Capaian kompetensi literasi membaca pada rapor pendidikan	80,95%	pelatihan literasi untuk pendidik;	jumlah peserta pelatihan literasi	Orang	-	-	-	81	81	152.347.000	Sumber Daya Manusia	Disdikpora	Disdikpora, Disperpusip
Hasil Asesmen Nasional turun karena kualitas pembelajaran kurang optimal sehingga hasil literasi menurun	Meningkatnya kualitas pembelajaran sehingga capaian literasi meningkat	Capaian kompetensi literasi membaca pada rapor pendidikan	80,95%	Lomba meningkatkan capaian literasi peserta didik;	Jumlah lomba literasi yang diselenggarakan	Kegiatan	-	-	2	-	2	-	Sumber Daya Manusia	Disdikpora	Disdikpora, Disperpusip
Hasil Asesmen Nasional turun karena kualitas pembelajaran kurang optimal sehingga hasil literasi menurun	Meningkatnya kualitas pembelajaran sehingga capaian literasi meningkat	Capaian kompetensi literasi membaca pada rapor pendidikan	80,95%	Penyediaan layanan perpustakaan daerah	Jumlah pengunjung	Orang	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000	-	Lain-lain	Disperpusip	Disperpusip
Hasil Asesmen Nasional turun karena kualitas pembelajaran kurang optimal sehingga hasil literasi menurun	Meningkatnya kualitas pembelajaran sehingga capaian literasi meningkat	Capaian kompetensi literasi membaca pada rapor pendidikan	80,95%	Penyediaan layanan perpustakaan daerah	Jumlah koleksi buku	Judul	-	1.000	-	-	1.000	50.000.000	Lain-lain	Disperpusip	Disperpusip
Hasil Asesmen Nasional turun karena kualitas pembelajaran kurang optimal sehingga hasil literasi menurun	Meningkatnya kualitas pembelajaran sehingga capaian literasi meningkat	Capaian kompetensi literasi membaca pada rapor pendidikan	80,95%	Pendampingan akreditasi perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang didampingi	Perpus-takaan sekolah	-	-	3	-	3	20.000.000	Lain-lain	Disperpusip	Disperpusip

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Hasil Asesmen Nasional turun karena kualitas pembelajaran kurang optimal sehingga hasil literasi menurun	Meningkatnya kualitas pembelajaran sehingga capaian literasi meningkat	Capaian kompetensi literasi membaca pada rapor pendidikan	80,95%	Penyelenggaran layanan perpustakaan keliling	Jumlah lokasi layanan	Lokasi	-	2	-	2	4	-	Sumber Daya Manusia	Disperpusip	Disperpusip
Hasil Asesmen Nasional turun karena kualitas pembelajaran kurang optimal sehingga hasil numerasi menurun	Meningkatnya kualitas pembelajaran sehingga capaian numerasi meningkat	Capaian kompetensi numerasi pada rapor pendidikan	80,95%	Pelatihan numerasi untuk pendidik;	Jumlah peserta pelatihan numerasi	Orang	-	-	-	69	69	75.625.000	Sumber Daya Manusia	Disdikpora	Disdikpora
Hasil Asesmen Nasional turun karena kualitas pembelajaran kurang optimal sehingga hasil numerasi menurun	Meningkatnya kualitas pembelajaran sehingga capaian numerasi meningkat	Capaian kompetensi numerasi pada rapor pendidikan	80,95%	Lomba untuk meningkatkan numerasi peserta didik;	Jumlah lomba numerasi yang diselenggarakan	Kegiatan	-	-	2	-	2	-	Sumber Daya Manusia	Disdikpora	Disdikpora
Masih kurangnya kompetensi pendidik	Meningkatnya kompetensi pendidik	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	92%	pelatihan peningkatan kompetensi pendidik	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kompetensi pendidik	orang	237	741	867	139	1.984	477.821.050	Perencanaan dan Penganggaran	Disdikpora	Disdikpora
Masih kurangnya kompetensi pendidik	Meningkatnya kompetensi pendidik	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	92%	Melakukan penilaian kompetensi bagi pendidik	Jumlah ASN pendidik yang dinilai kompetensinya	ASN	94	222	951	-	1.267	44.345.000	Sumber Daya Manusia	BKPSDM	BKPSDM
Masih kurangnya kompetensi pendidik	Meningkatnya kompetensi pendidik	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	92%	Melakukan penilaian kompetensi bagi pendidik	Jumlah ASN yang direkomendasikan untuk pemenuhan kompetensi	ASN	94	222	951	-	1.267	-	Sumber Daya Manusia	BKPSDM	BKPSDM
Masih kurangnya sarpras layanan pendidikan	Peningkatan kualitas sarpras pendidikan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang layak	80%	pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana yang layak	persen	-	-	-	80	80	1.013.858.000	Perencanaan dan Penganggaran	Disdikpora, DPUPKP, BPBJ	Disdikpora

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksa-na
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Masih kurangnya sarpras layanan pendidikan	Peningkatan kualitas sarpras pendidikan	Persentase penuhan sarana dan prasarana yang layak	80%	Penyelenggaran Angkutan gratis untuk siswa sekolah	Jumlah operasional bus sekolah pada hari sekolah	kali/hari	2	2	2	2	2	70.800.000	Inovasi	Dishub	Dishub
Pelayanan terhadap kelompok rentan belum maksimal	Intervensi Khusus Untuk Kelompok Rentan	Prosentase Kompetensi guru inklusi	10%	Melaksanakan pelatihan pendidikan inklusi untuk guru	Prosentase guru yang sudah mendapatkan pelatihan pendidikan inklusi	persen	-	-	5	-	5	16.657.500	Sumber Daya Manusia	Disdikpora	Disdikpora
Pelayanan terhadap kelompok rentan belum maksimal	Intervensi Khusus Untuk Kelompok Rentan	Cakupan Sarpras Inklusi	4 satuan pendidikan	Menyediakan sarpras pendukung inklusi	Jumlah satuan pendidikan yang menyediakan sarpras pendukung inklusi	satuan pendidikan	-	-	4	-	4	20.000.000	Pengawasan	Disdikpora	Disdikpora
Pendidikan karakter/Pendidikan khas kejogjakartaan belum tertuang dalam kurikulum pendidikan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan karakter pada jenjang pendidikan dasar	Prosentase satuan pendidikan yang mendapatkan pelatihan pendidikan karakter	100%	Melaksanakan pelatihan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan	Jumlah pelatihan pendidikan karakter	kali Kegiatan	-	-	1	-	1	51.317.500	Sumber Daya Manusia	Disdikpora	Disdikpora
Masih tinggi angka putus sekolah dari keluarga kurang mampu	Menurunnya angka putus sekolah	angka putus sekolah	0,04%	Seleksi calon peserta sekolah rakyat	Jumlah calon siswa sekolah rakyat	orang	-	-	144	-	144	-	Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial	Dinas Sosial

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH